



# LAKIN 2022

LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2022



**BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) DI MAKASSAR**



# KATA PENGANTAR

Kepala BBPPKS di Makassar

Segala puji bagi Allah karena dengan rahmat-Nya juaah sehingga Laporan Kinerja ini dapat selesai tepat waktu dan semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw.

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap satuan kerja atau lembaga atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator, sasaran kegiatan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BBPPKS di Makassar Tahun 2022.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan anggaran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Makassar Tahun 2022.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan ataupun saran. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi proses penyelenggaraan pelaksanaan (a) Program Perlindungan Sosial dan (b) Program Dukungan Manajemen pada BBPPKS di Makassar

Makassar, Februari 2023

Kepala BBPPKS di Makassar

Anna Puspasari

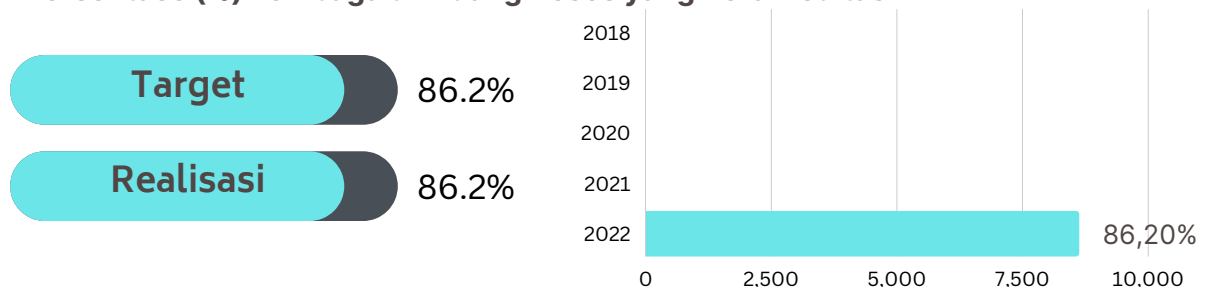
# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun 2022 periode bulan September s/d Desember terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di Kementerian Sosial dalam rangka melaksanakan kebijakan presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas kementerian sosial. Dengan adanya SOTK baru ini maka terjadi perubahan 1) perubahan kode satker dari Kode Satker 369965 (lama) menjadi 690554 (baru); 2) perubahan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja. Dari 6 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja untuk mengukur ketercapaiannya, 1 diantaranya belum didapatkan nilainya, 7 indikator capaiannya 100%. Sementara itu untuk realisasi anggaran sebesar 98,74% dari pagu sebesar Rp 6.978.691.000,-

## SASARAN KEGIATAN 1

### Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

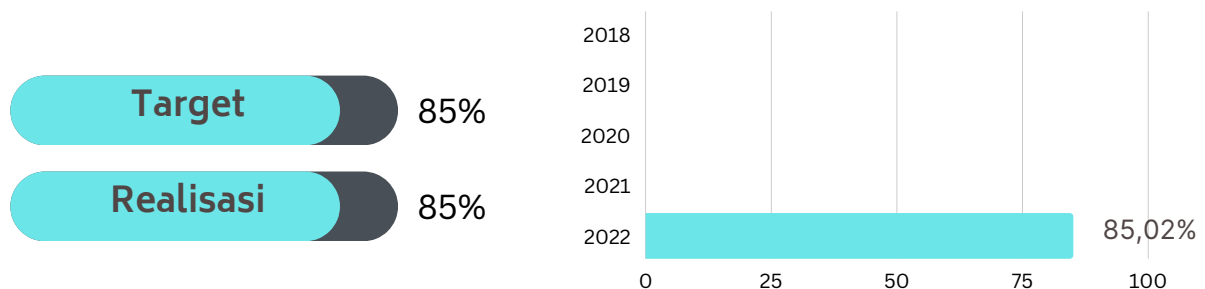
#### 1.1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi



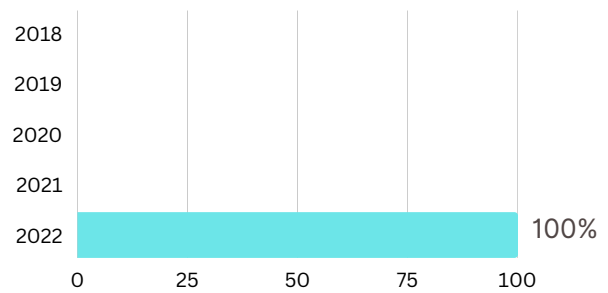
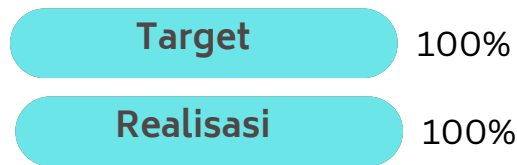
## SASARAN KEGIATAN 2

### Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

#### 2.1 Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi



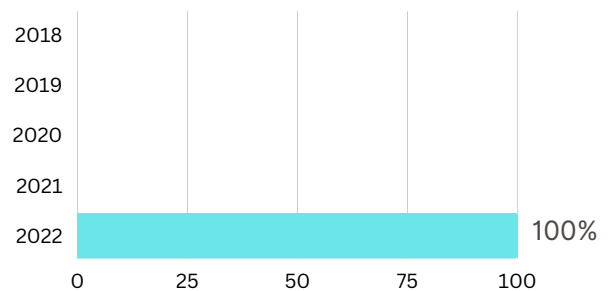
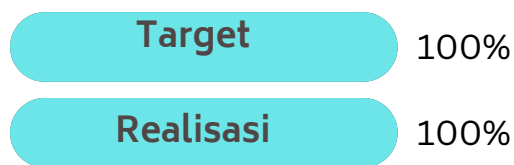
## 2.2 Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat



### SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat

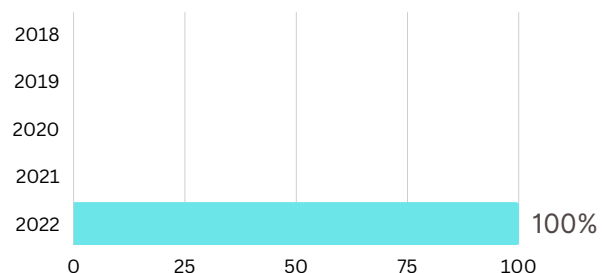
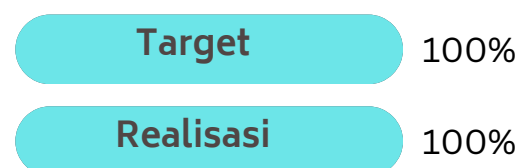
#### 3.1 Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup



### SASARAN KEGIATAN 4

Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar

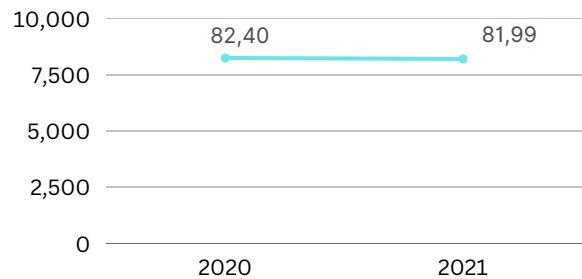
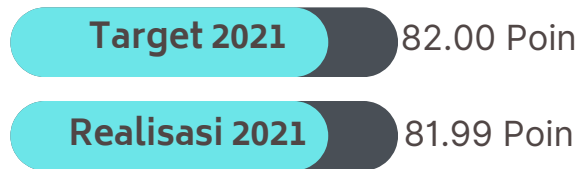
#### 4.1 Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi



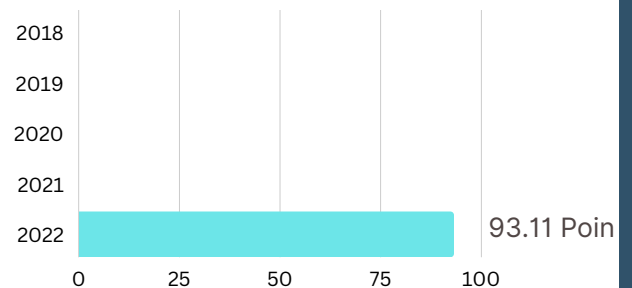
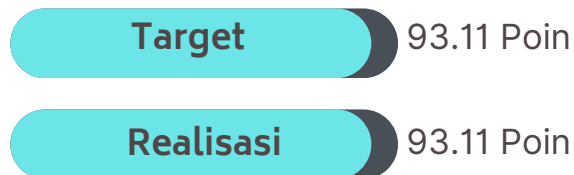
## SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Tata Kelola BBPPKS yang Baik Dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi

### 5.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP



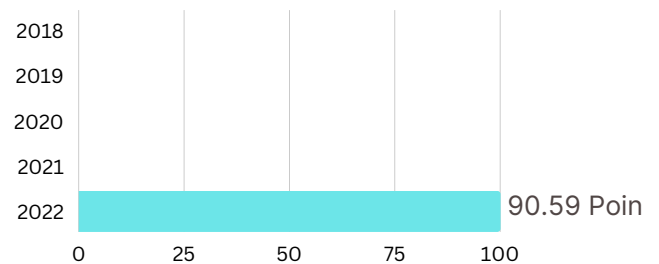
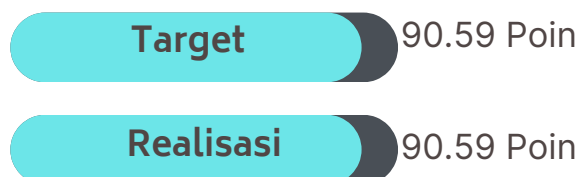
### 5.2. Nilai Kinerja Anggaran



## SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar

### 6.1 Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar



# DAFTAR ISI

## CONTACT



(0411) 584057



bbppksmks@gmail.com



BBPPKS Regional V Sulawesi



www.bbppksmakassar.kemsos.go.id

## Bab II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis .....	8
Rencana Kerja .....	10
Perjanjian Kinerja .....	12
Anggaran .....	13

## Bab IV Penutup

Penutup .....	32
---------------	----

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii

## Bab I Pendahuluan

Latar Belakang .....	1
Tugas & Fungsi .....	2
Struktur Organisasi .....	3
Sumber Daya Manusia .....	5
Peran Strategis .....	6
Sistematika Pelaporan .....	7

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja .....	14
Capaian Kinerja .....	14
Analisis Capaian Kinerja .....	16
Realisasi Keuangan .....	30
Analisis Efisiensi .....	31

## Lampiran

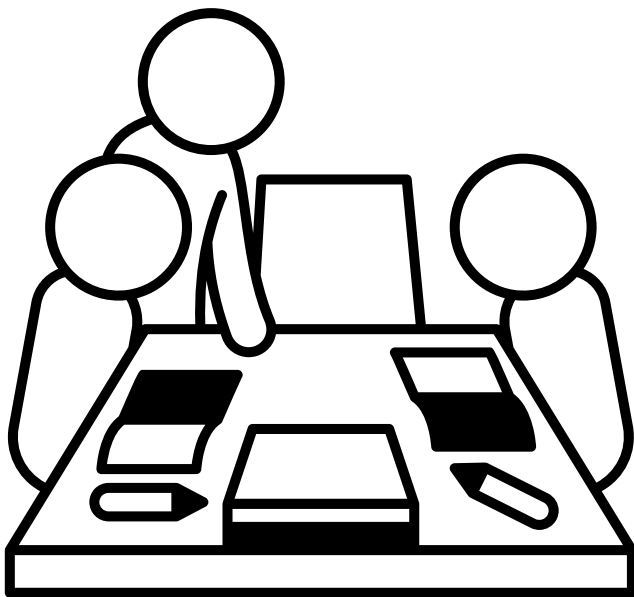


# 01 PENDAHULUAN



## LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi, pemanfaatan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Di Lingkungan Kementerian Sosial RI mewajibkan setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI, wajib menyusun penetapan kinerja dan pengukuran target kinerja, dan penyusunan laporan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja BBPPKS di Makassar Periode Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan BBPPKS di Makassar Tahun Anggaran 2022.

Aspek strategis dan isu strategis tahun 2022 fokus pada layanan ATENSI dan pencapaian target Prioritas Nasional Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM PKH serta Sertifikasi SDM Kesos dan Akreditasi Lembaga Kesos serta Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat



## TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BBPPKS menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat;
3. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha.



Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 221/HUK/2022 ditetapkan tugas tambahan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yaitu melaksanakan Sentra Layanan Sosial sebagai wahana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud terdiri atas pelaksanaan:

1. Rehabilitasi sosial;
2. Pemberdayaan sosial;
3. Perlindungan dan jaminan sosial;
4. Manajemen kasus;
5. Sertifikasi;
6. Akreditasi;
7. Sentra kreasi atensi; dan/atau
8. Fungsi lainnya sesuai dengan penugasan Menteri



Peraturan Menteri Sosial  
No 2 Tahun 2022 Tentang  
Organisasi dan Tata Kerja  
BBPPKS

Scan Me

## STRUKTUR ORGANISASI



Kepala BBPPKS di Makassar



Bagian Tata Usaha



Kelompok Jabatan Fungsional



Instalasi

## Bagian Tata Usaha

**Tugas :** melaksanakan urusan ketatausahaan

**Fungsi :** melaksanakan urusan ketatausahaan, Penyusunan rencana, program, dan anggaran; Pengelolaan urusan kepegawaian; Pengelolaan urusan keuangan; Pengelolaan barang milik negara; Penataan organisasi dan tata laksana; Pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan; Pengelolaan urusan hubungan masyarakat; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

## Kelompok Jabatan Fungsional

**Tugas :** melaksanakan urusan ketatausahaan

**Fungsi :** memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

## Instalasi

Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.



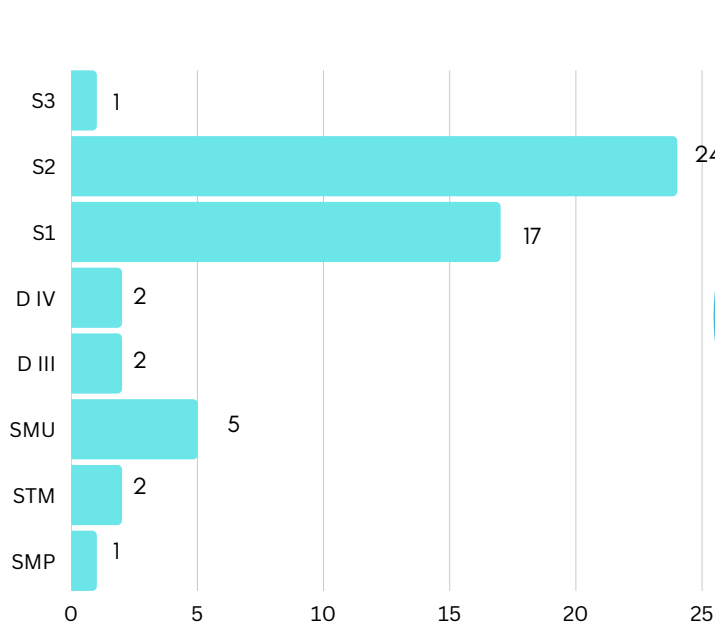
## SUMBER DAYA MANUSIA

**32 orang  
Pria**

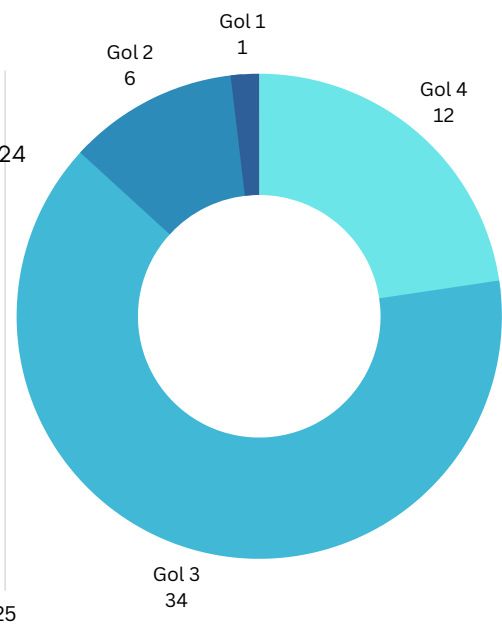


**21 orang  
Wanita**

**53 orang  
Total Pegawai**



**Pendidikan**



**Pangkat/Golongan**

## PERAN STRATEGIS

### 01. Wilayah Kerja Yang Luas

Wilayah kerja yang cukup luas mencakup 6 (enam) provinsi, yaitu: Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat yang terdiri atas 70 kabupaten, 11 kota

### 02. Perluasan Fungsi BBPPKS

Adanya perluasan tugas pokok dan fungsi BBPPKS di Makassar yaitu melaksanakan Sentra Layanan Sosial sebagai wahana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud terdiri atas pelaksanaan: 1. Rehabilitasi sosial; 2. Pemberdayaan sosial; 3. Perlindungan dan jaminan sosial; 4. Manajemen kasus; 5. Sertifikasi; 6. Akreditasi; 7. Sentra kreasi atensi; dan/atau; dan 8. Fungsi lainnya sesuai dengan penugasan Menteri



Keputusan Menteri Sosial  
No 221/HUK/2022 Tentang  
Sentra Layanan Sosial  
pada BBPPKS

Scan Me

### Wilayah Kerja

## SISTEMATIKA PELAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, laporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja BBPPKS di Makassar adalah sebagai berikut :

01

### **PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi yang sedang dihadapi organisasi

02

### **PERENCANAAN KINERJA**

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan anggaran

03

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bagian ini menguraikan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Analisis Efisiensi

04

### **PENUTUP**

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja BBPPKS di Makassar selama Tahun 2022 dan upaya untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya



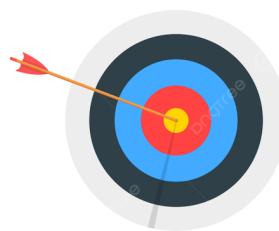
## 02 PERENCANAAN KINERJA

## RENCANA STRATEGIS



Visi: Menjadi Pusat Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial yang inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan Tenaga Kesejahteraan Sosial

- Misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi yaitu:
1. Menyusun rencana program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat Kesejahteraan Sosial.
  2. Melaksanakan Diklat TKSP dan TKSM sesuai Standarisasi Diklat Kesejahteraan Sosial.
  3. Melaksanakan manajemen pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang akuntabel dan transparan



Adapun Tujuan/Sasaran dan indikator tujuan yang akan dicapai BBPPKS di Makassar ialah :

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	1. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi 2. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi
Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2. Nilai Kinerja Anggaran
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar	Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar



Pada periode bulan September s/d Desember terjadi perubahan Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK) baru di Kementerian Sosial dalam rangka melaksanakan kebijakan presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien. Dengan adanya SOTK baru ini maka terjadi perubahan kode satker dari Kode Satker 369965 (lama) menjadi 690554 (baru) Adapun rincian perubahan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja dari SOTK Lama ke SOTK Baru ialah sebagai berikut :

### **SEMULA (SOTK Lama)**

#### **Sasaran Strategis**

01. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Indikator :

Jumlah Sumber Daya manusia Kesejahteraan Sosial aparatur dan masyarakat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dengan predikat baik

a. Jumlah lulusan peserta diklat kesejahteraan sosial bagi aparatur (TKSP) dengan predikat nilai baik

b. Jumlah lulusan peserta diklat kesejahteraan sosial bagi masyarakat (TKSM) dengan predikat nilai baik

02 Terwujudnya tata kelola diklat kesejahteraan sosial yang baik

Indikator :

Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pelayanan BBPPKS di Makassar (menggunakan skala 1-4)

03 Terwujudnya Kualitas tata kelola manajemen yang baik

Indikator

a. Nilai SAKIP BBPPKS di Makassar TA 2021

b. Nilai Kinerja anggaran BBPPKS di Makassar Tahun 2021

c. Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021

### **MENJADI (SOTK Baru)**

#### **Sasaran Kegiatan**

01. Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

Indikator :

Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

02 Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

Indikator:

a. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi

b. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat

03 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat

Indikator :

Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup

04 Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar

Indikator :

Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi

05 Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Indikator :

a. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

b. Nilai Kinerja Anggaran

06 Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar

Indikator :

Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar

## RENCANA KERJA

Sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) BBPPKS di Makassar terdiri dari 2 program dan 6 kegiatan dan mendukung Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

### Program Perlindungan Sosial

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar		2.428.542.000,-
Indikator Kinerja : Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	86,20 %	
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos		
Indikator Kinerja : 1. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi 2. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	85,02 % 100,00 %	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat		
Indikator Kinerja: Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	100,00 %	
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar		
Indikator Kinerja: Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100,00 %	

## Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi		4.550.149.000,-
Indikator Kinerja : 1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2. Nilai Kinerja Anggaran	82,00 Poin 93,11 Poin	
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar		
Indikator Kinerja: Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar	90,59 Poin	



## PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2022, dilakukan 2 kali perubahan perjanjian kinerja BBPPKS di Makassar hal ini disebabkan karena adanya perubahan SOTK di lingkungan kementerian sosial dan karena adanya pergantian pejabat (kepala BBPPKS di Makassar) dan juga penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	86,20 %
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	1. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi 2. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	85,02 % 100,00 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	100,00 %
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100,00 %
Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2. Nilai Kinerja Anggaran	82,00 Poin 93,11 Poin
Meningkatnya Kepuasan stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar	Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar	90,59 Poin

## ANGGARAN

Pagu awal BBPPKS di Makassar adalah Rp. 6.628.691.000,- Selanjutnya dalam perjalanannya terdapat 4 (empat) kali perubahan (revisi) anggaran, sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 6.978.691.000,- atau bertambah Rp 350.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

### Anggaran Per Kegiatan (KRO)

Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, Rp. 981.712.000,-

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Rp. 28,378,000,-

Pengelolaan Organisasi dan SDM, Rp. 497,102,000,-



Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Rp. 1.445.630.000,-

Penyelenggaraan Diklat Program Keluarga Harapan, Rp. 1.200.000,-

Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rp. 4.024.669.000,-

### History Revisi

#### Revisi Ke-1

Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan pelayanan publik terhadap masyarakat, penyesuaian anggaran pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi SDM dan akreditasi LKS

#### Revisi Ke-2

- Adanya pembukaan tanda blokir pada kegiatan 6898.SCJ.101.101.A.521211 Automatic Adjustment
- Adanya pergeseran anggaran pada Program Perlindungan Sosial antar Kegiatan dan KRO dari kegiatan 6898.SCJ ke Kegiatan 6881.DCJ sebesar Rp. 743.020.000,- sehingga menyebabkan penambahan target dari semula 120 orang menjadi 270 orang
- Adanya pergeseran anggaran antar satker ke BBPPKS di Makassar sebesar Rp. 250.000.000,- pada Kegiatan 6898.SCJ
- Adanya pergeseran anggaran antar satker dari pusdiklatbangprof ke satker BBPPKS di Makassar sebesar Rp. 100.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan kekurangan belanja pegawai pada kegiatan 6288.EBA.994

#### Revisi Ke-3

Pemutakhiran data POK dan Update Data Rencana Penarikan pada halaman III DIPA

#### Revisi Ke-4

Pemutakhiran data POK dan Update Data Rencana Penarikan pada halaman III DIPA



Scan Me

RKAKL SOTK BARU  
BBPPKS  
di  
Makassar Tahun  
2022



# 03 AKUNTABILITAS KINERJA



## PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BBPPKS di Makassar dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada masing-masing sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi kinerja dari target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja.



Capaian kinerja tertinggi ditetapkan 100%, sehingga apabila terdapat angka capaian diatas 120% akan dihitung 100%

## CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target. Dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan, masih terdapat 1 indikator yang belum didapatkan nilainya yaitu Nilai Hasil Evaluasi SAKIP. Adapun Ringkasan Capaian Kinerja BBPPKS di Makassar tahun 2022 ialah sebagai berikut :



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	86,20 %	86,20 %	100,00 %
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	1. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi 2. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	85,02 % 100,00 %	85,02 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2. Nilai Kinerja Anggaran	82,00 Poin 93,11 Poin	n.a 93,11 Poin	n.a 100,00
Meningkatnya Kepuasan stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar	Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar	90,59 Poin	90,59 Poin	100,00





## ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### SK 1

#### Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ke-1 "Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar," terkait dengan tugas tambahan BBPPKS di Makassar sebagai Sentra Layanan Sosial yaitu pelaksanaan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu: Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	86,20	86,20	100,00
<b>Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>			<b>100,00</b>

#### 1.1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong bagi lembaga dibidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga mutu pelayanan kesejahteraan sosial dapat diukur dan ditingkatkan.

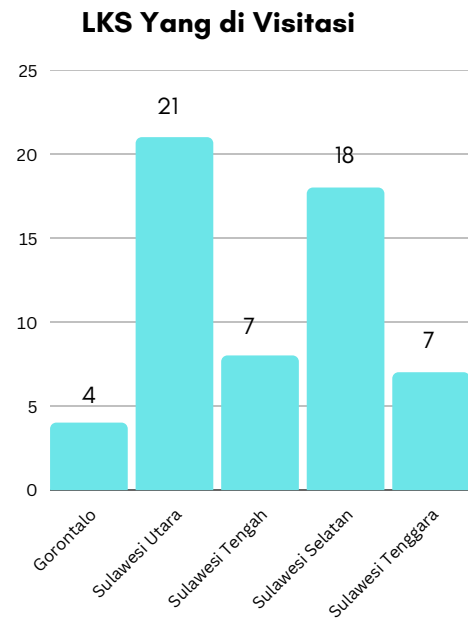
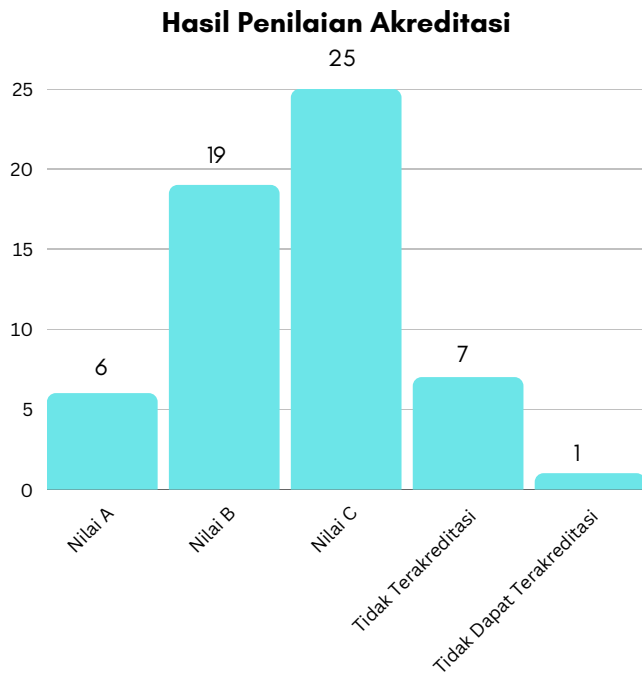


Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar

=

$$\frac{\text{Lembaga kesejahteraan sosial terakreditasi}}{\text{Lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti akreditasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, BBPPKS di Makassar dengan dukungan BALKS dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi telah melakukan penilaian akreditasi kepada 58 LKS di 5 provinsi dan 14 Kabupaten/kota. Capaian ini melebihi dari terget yang telah ditentukan sebelumnya untuk wilayah regional Sulawesi yaitu 50 LKS.



Berdasarkan hasil penilaian akreditasi terhadap 58 LKS yang telah di visitasi dapat diketahui bahwa lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar adalah 50 LKS atau tercapai 86,20% sesuai target yang telah ditetapkan.

$$\text{LKS yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar} = \frac{50}{58} \times 100\% = 86,20\%$$

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	*	*	86,20%	86,20%	87,00%

Pada tahun 2021, indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya



## SK 2


## Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

Sasaran Kegiatan ke-2 "Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara Kesos," dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian tujuan Kementerian Sosial, yaitu meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi, dan (2) Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat.

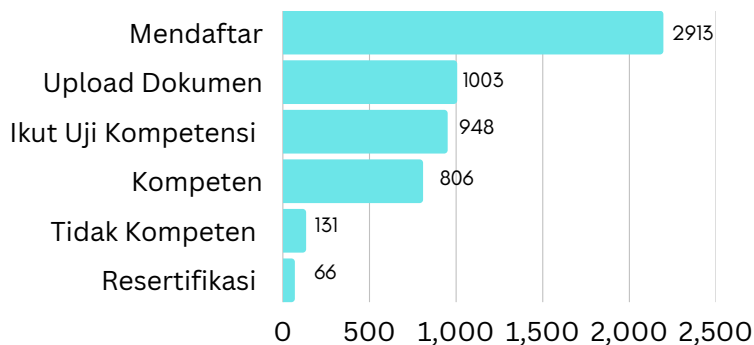
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi	85,02	85,02	100,00
2. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	100,00	100,00	100,00
<b>Rata Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2</b>			<b>100,00</b>

### 2.1. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi

Indikator ini mengukur profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentunya perlu didukung SDM kesejahteraan sosial yang profesional, sehingga dapat mempercepat peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.


$$\text{SDM Kesejahteraan Sosial yang Profesional dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial} = \frac{\text{SDM kesejahteraan sosial yang lulus uji kompetensi}}{\text{Total SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti uji kompetensi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, terdapat 2913 peserta yang mendaftar sertifikasi secara online, 1003 orang yang mengupload dokumen, 948 orang yang mengikuti proses uji kompetensi (bimtek, uji kognitif, uji wawancara) dan berdasarkan hasil penilaian dari 948 orang, 806 orang dinyatakan lulus uji kompetensi dengan rincian sebagai berikut ;



**Data Sertifikasi**

Berdasarkan data diatas maka Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos yang tersertifikasi adalah 806 orang atau tercapai 85,02 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bila dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 2913 orang dan yang mengupload dokumen hanya 1003 orang hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dan bila dilihat dari data diatas peserta yang tidak Kompeten yaitu sebanyak 131 orang hal ini disebabkan karena beberapa peserta tidak mengikuti proses sertifikasi misalnya ujian kognitif dan wawancara dan assesor yang lupa memberi nilai

$$\frac{\text{SDM Kesejahteraan Sosial yang Profesional dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Ikut Uji Kompetensi}} = \frac{806}{948} \times 100\% = 85,02\%$$

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi	*	*	85,02%	85,02%	86,00%

Pada tahun 2021, indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya

## 2.2. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat

Pada tahun 2022 target Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting yang diselenggarakan oleh BBPPKS di Makassar (SOTK lama dan baru) telah rampung sesuai target yaitu 840 orang dengan rincian SOTK Lama sebanyak 800 orang dan SOTK Baru sebanyak 40 orang atau tercapai 100%

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	3230 Org	3230 Org	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 indikator kinerjanya "Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang telah mengikuti peningkatan kompetensi kesejahteraan sosial yang terstandarisasi" dengan realisasi sebesar 100% dan pada tahun 2022 indikator kinerjanya "Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat" dengan realisasi 100% pula



## SK 3

### Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat

Sasaran Kegiatan ke-3 "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat" terkait dengan tugas BBPPKS di Makassar yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu: Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	100,00	100,00	100,00
<b>Capaian Sasaran Kegiatan 3</b>			<b>100,00</b>

#### 3.1. Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup

Indikator ini mengukur penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada penerima manfaat kewirausahaan sosial dan pendamping sosial agar memiliki kemampuan keterampilan berusaha atau kemampuan psikososial untuk berperilaku adaptif dan positif yang membuat seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan tantangan sehari-hari dengan efektif. Kriteria keberhasilan indikator kinerja ini adalah apabila > 50% penerima manfaat yang mengikuti diklat meningkat kecakapan hidupnya.

Pada tahun 2022 BBPPKS di Makassar menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pelatihan vokasional dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas Penerima Manfaat sehingga dapat membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Selain itu Pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan income peserta diklat, pendampingan, dan akses dasar, serta mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan kategori (Agribisnis, tata boga, industri kerajinan, dan grocery).

Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial ini menggunakan metode pembelajaran klasikal atau tatap muka dengan metode PRA (Participatory Rural Appresial) yaitu sebuah pendekatan yang mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah kegiatan, oleh sebab itu pelatihan ini dilaksanakan di rumah warga agar lebih banyak dialog antara fasilitator dan peserta pelatihan.

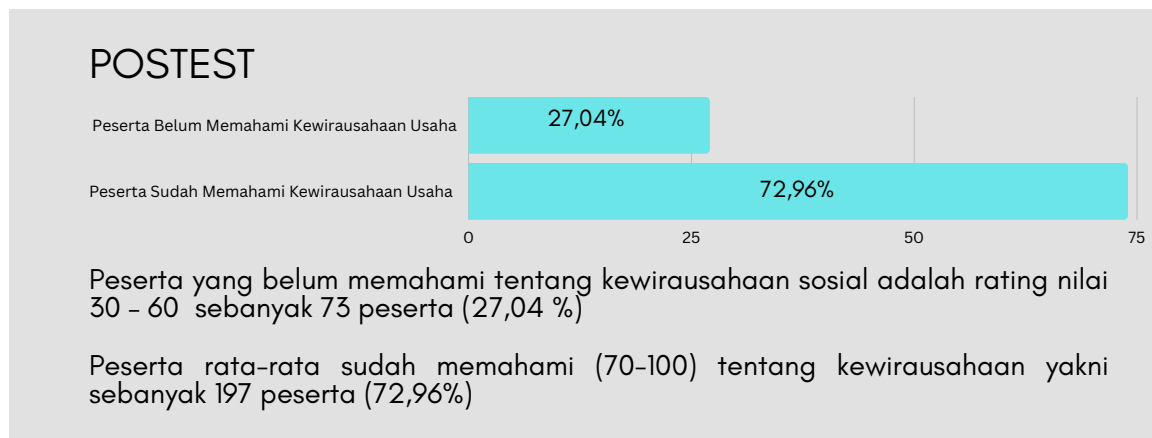
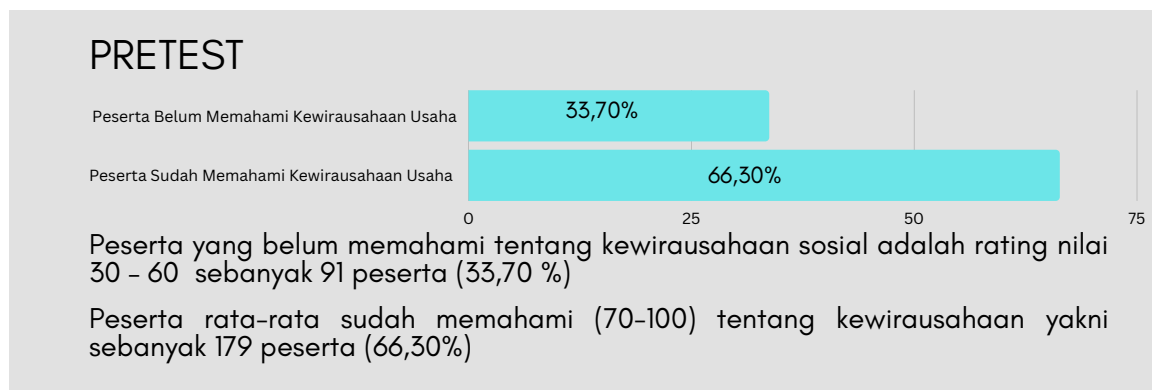
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari sebanyak tiga gelombang 9 angkatan dan masing-masing angkatan 30 orang peserta. Peserta Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar (Galesong), dan Kabupaten Takalar (Galesong Utara) sebanyak 270 orang.

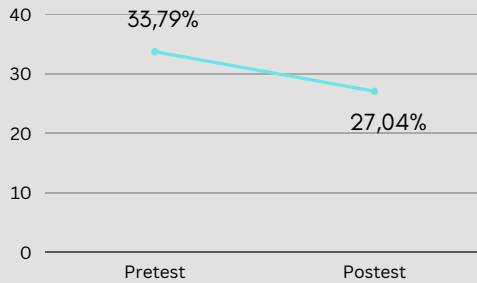
$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 270/270 \times 100\% = 100\%$$

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	*	*	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya

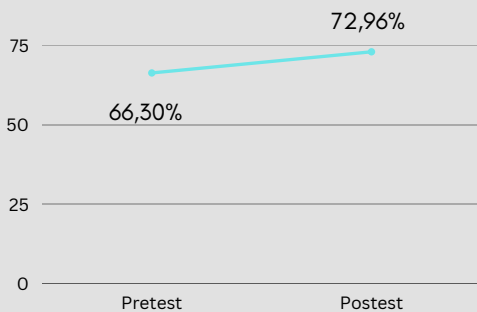




### Belum Memahami

Peserta yang belum memahami tentang kewirausahaan sosial adalah rating nilai 30 - 60 sebanyak:

- Pretest 91 peserta (33,79 %)
- Posttest 73 peserta (27,04 %)



### Sudah Memahami

Peserta rata-rata sudah memahami (70-100) tentang kewirausahaan sosial yakni sebanyak:

- Pretest 179 peserta (66,30%)
- Posttest 197 peserta (72,96%)



Video Testimoni  
Pelatihan Dayamas  
BBPPKS di Makassar  
Tahun 2022

Scan Me



II ■ Gelar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ■ III

## BBPPKS Makassar Dorong PPKS Hidup Mandiri dan Produktif

**MAKASSAR, RAKSUL** - Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Manfaat (PM) di Sentra Gau Ma-

bagi Kabupaten Gowa. Pelatihan ini menyasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki karakteristik jenis usaha sama (kuliner).

Pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal ini menggunakan pendekatan life skills training sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan sosial yang dilakukan melalui pelatihan dan pemberian keterampilan agar PPKS mampu untuk hidup mandiri dan produktif.

Peserta pelatihan sebanyak 30 orang peserta yang dibatasi pada rentang usia di bawah 40 (empat puluh) tahun dengan menghadirkan dua narasumber atau praktisi, yaitu Monica Harjati dengan materi Packaging and Digital Marketing.

Narasumber kedua adalah seorang owner Diah Cookies, Surabaya Diah Afranti yang menyampaikan materi Bisnis Rumahani Jadi Omzet Miliran.



**GELAR PELATIHAN.** Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Manfaat (PM) di Sentra Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

▶ BERSAMBUNG KE HAL 6

## BBPPKS Makassar .....

Dari Halaman 5.....

Untuk memberikan motivasi kepada peserta, peserta disuguhkan kisah sukses dan praktik membuat kue dari penerima bantuan PKH Kota Makassar atas nama Santi, yang sehari-hari berjualan kue boroncong di depan Komplek Perumahan NTI dengan omset sebesar Rp 300.000 per hari.

Pelaksanaan pelatihan selama 3 (tiga) hari ini dimulai dari tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2022, bertempat di Aula BBPPKS Makassar dengan metode 20% teori dan 80% praktik. Di sela-sela kegiatan juga dilaksanakan penanaman ubi jalar di lahan kosong BBPPKS Makassar oleh peserta pelatihan.

Pelatihan kewirausahaan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BBPPKS Makassar, Anna Puspasari, dan dihadiri oleh para kepala sentra yang mewakili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat struktural dan fungsional BBPPKS Makassar.

Dalam sambutannya, kepala BBPPKS Makassar Anna Puspasari berharap agar melalui pelatihan ini, penerima manfaat dapat meningkatkan kemampuannya untuk meajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik.

Rezki Wahyuni, peserta dari KPM PKH Kota Makassar mengaku senang mengikuti pelatihan ini. "Saya senang mengikuti pelatihan ini, semula saya tidak tahu cara mengemas produk yang bagus, setelah mengikuti pelatihan saya tahu cara mengemas produk supaya menarik minat konsumen untuk membeli," ujarnya.

ujarnya.

Sementara itu Rahmiwati, PM dari Sentra Gau Mabaji Gowa mengungkapkan rasa senang dan terbantu dengan alat-alat usaha yang diberikan karena dapat membantu untuk mengembangkan usaha.

Kegiatan ditutup oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr H Ashabul Kahfi. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan begitu pedulinya negara dengan masyarakat yang perlu bantuan.

"Baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Hari ini ada pelatihan peningkatan kapasitas di bidang kuliner. Saya kira, pilihan pelatihan kuliner ini untuk kondisi hari ini sangat tepat karena kebutuhan kuliner itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Terutama hampir masyarakat kota menggantikan makanannya melalui layanan, baik itu di warung ataupun restoran. Mereka menggantikan kebutuhannya kepada produsen makanan sehingga menurut saya ini sangat tepat," ujarnya.

Tidak hanya diberikan teori dan ilmu saja, diakhir pelatihan peserta diberikan bantuan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) berupa perangkat usaha kuliner atau sesuai hasil asesmen yang dilakukan oleh Sentra Gau Mabaji Gowa. Total bantuan yang diberikan yaitu sejumlah Rp 199.827.750,00. Peserta juga dibuatkan grup Whatsapp untuk memantau perkembangan usahanya. (sas/c)

Form Monitoring Pelatihan  
Pemberdayaan Masyarakat  
BBPPKS di Makassar  
Tahun 2022

Scan Me

Laporan Pelatihan  
Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui Kewirausahaan  
Sosial Gelombang III  
BBPPKS di Makassar

Scan Me

### BBPPKS Makassar Gelar Pelatihan Kewirausahaan

## Sasar PPKS agar Hidup Mandiri dan Produktif

**MAKASSAR, UPEKS** - Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Manfaat (PM) di Sentra Gau Mabaji, Kabupaten Gowa.



**PELATIHAN.** BBPPKS Makassar menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial bagi KPM PKH dan Penerima Manfaat (PM) di Sentra Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Pelatihan ini menyasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki karakteristik jenis usaha sama (kuliner). Pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal ini menggunakan pendekatan life skills training sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan sosial yang dilakukan melalui pelatihan dan pemberian keterampilan agar PPKS mampu untuk hidup mandiri dan produktif.

Peserta pelatihan sebanyak 30 orang peserta yang dibatasi pada rentang usia di bawah 40 tahun dengan menghadirkan dua narasumber atau praktisi, yaitu Monica Harjati dengan materi Packaging and Digital Marketing.

▶ Ke Halaman 7

Laporan Pelatihan  
Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui Kewirausahaan  
Sosial Gelombang I  
BBPPKS di Makassar

Scan Me

Laporan Pelatihan  
Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui Kewirausahaan  
Sosial Gelombang II  
BBPPKS di Makassar

Scan Me

## Sasar PPKS agar Hidup Mandiri dan Produktif

▶ dari Halaman 1

Narasumber kedua, owner Diah Cookies, Surabaya, Diah Afranti yang menyampaikan materi Bisnis Rumahani Jadi Omzet Miliran. Untuk memberikan motivasi, peserta disuguhkan kisah sukses dan praktek membuat kue dari penerima bantuan PKH Kota Makassar Ibu Santi, yang sehari-hari berjualan kue boroncong di depan Komplek Perumahan NTI dengan omset sebesar Rp300.000/hari. Pelaksanaan pelatihan selama 3

hari dimulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 2022 di Aula BBPPKS Makassar dengan metode 20% teori dan 80% praktik. Di sela-sela kegiatan juga akan dilaksanakan penanaman Ubi Jalar di lahan kosong BBPPKS Makassar oleh peserta pelatihan.

Pelatihan kewirausahaan dibuka Kepala BBPPKS Makassar, Anna Puspasari, M.Si. di hadir para Kepala Sentra yang mewakili di wilayah Provinsi Sulsel, pejabat struktural dan fungsional BBPPKS Makassar. Kepala BBPPKS Makassar, ber-

harap agar melalui pelatihan ini, penerima manfaat dapat meningkatkan kemampuannya untuk meajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag menyampaikan, begitu pedulinya negara ke masyarakat yang perlu bantuan, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Hari ini ada pelatihan peningkatan kapasitas di bidang kuliner.

Rezki Wahyuni, peserta dari KPM PKH Kota Makassar mengaku sen-

ang mengikuti pelatihan ini. "Senang mengikuti pelatihan ini, semula saya tidak tahu cara mengemas produk yang bagus, setelah mengikuti pelatihan, saya tahu cara mengemas produk supaya menarik minat konsumen untuk membeli," ujarnya.

Sementara, Rahmiwati, PM dari Sentra Gau Mabaji Gowa mengungkapkan, pihaknya senang dan terbantu dengan alat-alat usaha yang diberikan. Alat ini bisa membantu saya untuk mengembangkan usaha.

"Saya termotivasi untuk kembali memulai usaha," ujarnya. (ris)

## SK 4

### Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar

Sasaran Kegiatan ke-4 "Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar" terkait dengan tugas tambahan BBPPKS di Makassar yaitu melaksanakan Sentra Layanan Sosial sebagai wahana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu: Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100,00	100,00	100,00
<b>Capaian Sasaran Kegiatan 4</b>			<b>100,00</b>

#### 4.1 Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi

Berdasarkan Kepmensos No 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, BBPPKS di Makassar memiliki tugas tambahan berupa pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial berupa ATENSI dengan indikator terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar penerima layanan melalui pemberian bantuan asistensi sosial, terdiri dari : sandang dan pangan, tempat tinggal sementara, akses kesehatan serta pelatihan vokasional.

Dalam pelaksanaannya BBPPKS di Makassar melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial berupa :

1. Atensi residential kepada 3 orang
2. Respon kasus kepada 16 orang,
3. Pelatihan vokasional (budidaya jamur tiram) kepada korban bencana alam di Cianjur

$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

$$19/19 \times 100\% = 100\%$$



Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	*	*	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, Indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## SK 5

### Terwujudnya Tata Kelola BBPPKS yang Baik Dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi

Sasaran Kegiatan ke-5 "Terwujudnya Tata Kelola BBPPKS yang Baik Dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi" ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: 1) Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dan 2) Nilai Kinerja Anggaran.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	82,00	n.a	n.a
2. Nilai Kinerja Anggaran	93,11	93,11	100,00
<b>Rata Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5</b>			<b>100,00</b>

#### 5.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Nilai akuntabilitas kinerja BBPPKS di Makassar merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BBPPKS di Makassar. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	82,00	81,99	82,00	n.a	83,00

Hingga laporan ini dibuat, nilai SAKIP BBPPKS di Makassar tahun 2022 belum didapatkan dari Inspektorat Jenderal karena proses evaluasi belum dilaksanakan. Apabila menggunakan hasil pada tahun 2021 sebesar 81,99 maka dengan target 82,00 pada tahun 2021 didapatkan capaian 99,98% dan apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 83,00 maka didapatkan capaian 98,78%.

## 5.2 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan BBPPKS di Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L. Kriteria keberhasilan indikator kinerja ini adalah Tercapainya nilai kinerja anggaran BBPPKS di Makassar sesuai dengan target yang ditetapkan



Pada tahun 2022, nilai SMART BBPPKS di Makassar sebesar 94,02 dan Nilai IKPA 91,76. Dengan rumus nilai kinerja anggaran adalah 60% SMART + 40% IKPA, maka didapatkan realisasi 93,11 atau tercapai 100,00% dengan kategori "Sangat Baik". Adapun pada tahun 2021, Indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya..



## SK 6

### Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar

Sasaran Kegiatan ke-6 "Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPKS di Makassar" ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar	90,59	90,59	100,00
<b>Capaian Sasaran Kegiatan 6</b>			<b>100,00</b>

#### 6.1 Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar

Indeks kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat. Nilai kepuasan stakeholders adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan baik kelompok maupun individu, instansi, yang diukur dengan cara membandingkan hasil yang mereka peroleh atau terima dengan tujuan program atau kegiatan yang juga dipengaruhi sudut pandang setiap pemangku kepentingan. Data dan informasi penilaian disajikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek persyaratan, sistem, mekanisme, proses, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana.

Pada tahun 2022 Survey dilakukan selama 2 bulan dari bulan November hingga Desember tahun 2022 yang mencakup 437 responden di 8 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Barat. Jumlah Responden sebanyak 437 orang yang merupakan penerima pelayanan dalam hal ini alumni peserta diklat di BBPPKS di Makassar pada tahun 2022 yang populasinya sebanyak 840 orang. Jumlah responden ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 86 responden

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024
Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar	3,5	3,57	90,59	90,59	91,50

Setiap unsur pelayanan memiliki nilai rata-rata tertimbang yang sama berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = Bobot nilai per unsur

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Umur Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	77,00 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan didapatkan nilai IKM 90,59 dengan predikat Sangat Baik sebagaimana yang tertera pada table mutu pelayanan berikut :

**TABEL BENTUK MUTU PELAYANAN**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**  
**KANTOR BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**BBPPKS MAKASSAR**  
**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2022**

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : BBPPKS MAKASSAR
90.59	<p style="text-align: center; margin: 0;">RESPONDEN</p> <p>Jumlah : 437 Org</p> <p>Jenis Kelamin : L : 250 Org P : 187 Org</p> <p>Pendidikan : SMA 2 Org</p> <p style="padding-left: 20px;">: D3 16 Org</p> <p style="padding-left: 20px;">: S1 397 Org</p> <p style="padding-left: 20px;">: S2 22 Org</p> <p style="padding-left: 20px;">: S3 0 Org</p> <p style="margin-top: 10px;">Periode Survey : Bulan Oktober - November 2022</p>

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
 MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
 DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Berdasarkan hasil survei, unsur yang mendapatkan nilai paling rendah adalah sarana dan prasarana (3,49) dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,51), sementara nilai tertinggi ada pada biaya/tarif (3,88) dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (3,82).



## REALISASI ANGGARAN



Pagu Rp. 6.978.691.000,-  
Realisasi Rp. 6.890.982.144,-

**98,74%**

### Anggaran Per Kegiatan

Pagu Rp. 1.445.630.000,-  
Realisasi Rp. 1.438.386.782,-

Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat

Pagu Rp. 981.712.000,-  
Realisasi Rp. 968.913.809,-

Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pagu Rp. 1.200.000,-  
Realisasi Rp. 928.000,-

Penyelenggaraan Diklat Program Keluarga Harapan

Pagu Rp. 28.378.000,-  
Realisasi Rp. 25.525.320,-

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

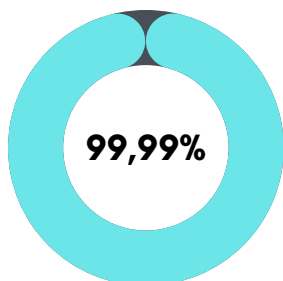
Pagu Rp. 4.024.669.000,-  
Realisasi Rp. 3.962.388.134,-

Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

Pagu Rp. 497.102.000,-  
Realisasi Rp. 494.840.099,-

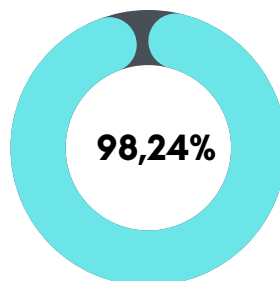
Pengelolaan Organisasi dan SDM

### Anggaran Per Jenis Belanja



#### BELANJA PEGAWAI

Pagu Rp. 2.019.714.000,-  
Realisasi Rp. 2.019.440.932,-



#### BELANJA BARANG

Pagu Rp. 4.958.977.000,-  
Realisasi Rp. 4.871.541.212,-



## ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Apabila capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran maka dapat dikatakan sudah efisien.

Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	100,00	98,08
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	100,09	94,10
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	100,00	99,50
Terrpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	100,00	99,65
Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	100,00	*
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders terhadap layanan BBPPPKS di Makassar	100,00	*

Dari 6 sasaran kegiatan yang ditetapkan, capaian kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan anggaran BBPPKS di Makassar sudah efisien.





# 04 PENUTUP

## PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Makassar Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Pada tahun 2022 BBPPKS di Makassar menetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang terbagi dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dari 6 sasaran kegiatan yang diukur melalui 8 indikator kinerja, masih terdapat 1 indikator yang belum didapatkan nilainya.. Nilai pencapaian kinerja BBPPKS di Makassar secara rata-rata adalah 100,00% yang dihitung dari rata-rata capaian setiap sasaran kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut:

### Belum di dapatkan nilai

1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

### Capaian > 100 %

1. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi
2. Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi
3. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat
4. Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup
5. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi
6. Nilai Kinerja Anggaran
7. Nilai Kepuasan Stakeholdes terhadap Layanan BBPPKS di Makassar

Maka berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja tahun anggaran 2022, BBPPKS di Makassar dapat dinyatakan memperoleh hasil kinerja baik, hal ini dapat dilihat salah satunya melalui capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat. Dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan di dapatkan nilai 90,59 dengan predikat Sangat Baik.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di BBPPKS di Makassar
2. Membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder seperti KPPN, Kanwil Ditjen Perpendaharaan, Kantor Ditjen Pajak, DJKN, BPKP dan seluruh stakeholder terkait
3. Tersedianya alokasi dana, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas BBPPKS di Makassar

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja kedepannya maka perlu menerapkan beberapa strategi atau upaya sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan baik melalui bimtek, pelatihan dan sebagainya
3. Meningkatkan mutu pengawasan internal melalui pengusulan WBK dan WBBM

## Pencanangan Zona Integritas BBPPKS di Makassar

**MAKASSAR, UPEKS**--Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Makassar menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, di Aula BBPPKS Makassar, Senin (10/10/2022).

Dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Su-

lawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, Inspektur Bidang Penunjang Kemensos RI, Iddit Supriadi Priatna, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, serta Kepala Dinsos Sulsel, Irawan Bintang.

Komitmen Pencanangan ZI ditandai dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BBPPKS Makassar Anna Puspasari yang di ikuti oleh seluruh pegawai.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai BBPPKS Makassar dan penandatanganan piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Kepala BBPPKS Makassar dan para saksi, yang terdiri dari Sekda Provinsi Sulsel, Inspektur Bid. Penunjang Kemensos RI, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel.

Kegiatan ini merupakan langkah awal pelaksanaan refor-

masi birokrasi untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sesuai dengan prinsip Good Governance.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Sulsel menuturkan, BBPPKS Makassar sebagai role model untuk balai-balai lain terutama untuk zona integritas.

"Pemerintah provinsi dan saya pribadi sangat mengapresiasi. Kita tinggal menunggu kolaborasi antar stake holder yang ada," tuturnya.

Inspektur Bidang Penunjang Kemensos RI menyampaikan, WBK WBBM sudah lama ingin dicanangkan.

"Saya harap kita tidak hanya berhenti pada pencanangan saja, namun yang terpenting

pada saat implementasinya. Saya harap dapat terimplementasi dengan baik," ujarnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulsel menyampaikan, ada tiga indikator keberhasilan dalam mencapai WBK dan WBBM, yaitu bertahan dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan efisiensi kerja birokrasi.

Menurutnya, Zona Integritas adalah pilot project, sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki pelayanan publik. Pelayanan yang prima, berkualitas, dan Excellent semoga dapat tercapai dalam waktu dekat.

Senada, Kepala BBPPKS Makassar mendukung pencanangan Zona Integritas menuju WBK WBBM guna mencapai reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. (ris/hms)



**PENCANANGAN.** BBPPKS menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Senin (10/10/2022).

layout: ela\_maspoer



# LAMPIRAN



REVISI KE-2

**KEMENTERIAN SOSIAL RI  
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI MAKASSAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Puspasari  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Afrizon Tanjung  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

  
Afrizon Tanjung

  
Anna Puspasari

Lampiran:

REVISI KE-2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI MAKASSAR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	86,20 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	1 Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi 2 Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	85,02 % 100,00 %
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	1 Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	100,00 %
4	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	1 Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100.00 %
5	Terwujudnya tata kelola BBPPKS yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2 Nilai Kinerja Anggaran	82.00 93.11
6	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan BBPPKS di Makassar	1 Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan BBPPKS di Makassar	90.59

Kegiatan Tahun 2022		Anggaran
<b>Program Perlindungan Sosial</b>		<b>2.428.542.000,-</b>
1	Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	1.445.630.000,-
2	Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	981.712.000,-
3	Penyelenggaraan Diklat Program Keluarga Harapan	1.200.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>4.550.149.000,-</b>
1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	28.378.000,-
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	4.024.669.000,-
3.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	497.102.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>6.978.691.000,-</b>

Jakarta, 11 November 2022

Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar



Afrizon Tanjung



Anna Puspasari